

ABSTRAK

Setiap orang, baik itu penyandang disabilitas maupun non-disabilitas memiliki martabat dan hak yang sama. Pada faktanya, para penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif sebagai anggota masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan hak aksesibilitas terhadap bangunan gedung. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Stasiun Kereta Api Kota Bekasi melalui implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung terkait desain universal dan pelaksanaan kewajiban negara untuk memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Stasiun Kereta Api Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *socio-legal research / socio legal studies* yang dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan, dianalisis secara kualitatif, dan dilakukan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 di Stasiun Kereta Api Kota Bekasi sebagian besar sudah dilaksanakan. Namun, terhadap kelengkapan prasarana dan sarana masih perlu ditingkatkan sesuai ketentuan. Selanjutnya, kewajiban negara (dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi) harus dilaksanakan dengan mengambil langkah yang tepat seperti pengaplikasian prinsip desain universal, pembentukan standar minimum, serta mekanisme pengawasannya yang harus dikembangkan bersama para *stakeholder*, khususnya para penyandang disabilitas.

Kata kunci: hak aksesibilitas; penyandang disabilitas; desain universal; kewajiban negara.

ABSTRACT

Everyone, either the persons with disabilities or non-disabilities have the same dignity and rights. In fact, the persons with disabilities still face barrier that hinder their fully participation and effectiveness as the member of citizen, in terms of the right of accessibility fulfillment against building. This research aims to know and analyze the right of accessibility fulfillment against the persons with disabilities in Bekasi Station through the implementation of Ministerial Regulation No.14 of 2017 concerning Building Easiness Requirements related to universal design and implementation of state obligations in fulfilling the accessibility right of persons with disabilities in Bekasi Station. The metode research is social-legal research/ socio legal studies conducted by examining primary and secondary data. The collected data would be divided, qualitatively analyzed, and discussed to obtain the conclusion. The result of this research showed that the implementation of The Ministerial Regulation No. 14 of 2017 in Bekasi Station has been largely implemented. However, the infrastructure and facilities still need to be improved in accordance to the regulation. Furthermore, the state obligations (in this case is Bekasi City Government) shall be implemented by taking the appropriate measures such as the implementation of universal design principles, establish the minimum standards and monitoring mechanism that should be developed together with every stakeholder, particularly the persons with disabilities.

Keywords: *right of accessibility; persons with disabilities; universal design; state obligations.*